



# Faktor-Faktor Penentu Efektivitas Program Repatriasi terhadap Pendidikan Anak Migran Indonesia di Malaysia

Chandra Martapura<sup>1</sup>, Amrozi Khamidi<sup>2</sup>, Muhammad Sholeh<sup>3</sup>, Mochamad Nursalim<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

E-mail: [chandra.23068@mhs.unesa.ac.id](mailto:chandra.23068@mhs.unesa.ac.id)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2025-05-13 Revised: 2025-06-23 Published: 2025-07-10  <b>Keywords:</b> <i>Repatriation Program; Indonesian Migrant Children; Non-Formal Education.</i>	<p>This study aims to identify and analyze the factors that influence the effectiveness of repatriation programs in ensuring the continuity of education for Indonesian migrant children. Adopting a qualitative descriptive approach through a literature review of 21 scholarly articles published between 2020 and 2025, the study reveals five key factors affecting the success of educational repatriation: (1) the child's documentation status and legal identity, (2) the availability of non-formal education services, (3) the effectiveness of the ADEM program and educational repatriation schemes, (4) the involvement of local governments and community participation, and (5) inter-agency coordination among government institutions. The findings indicate that the lack of legal documentation poses both administrative and social barriers to accessing formal education in Indonesia. On the other hand, the existence of Community Learning Centers (PKBM) and learning centers in host countries serves as a transitional mechanism toward the Indonesian national education system. The active role of local governments, along with the support of local communities, proves crucial in ensuring an inclusive and adaptive reintegration process. This study underscores the importance of cross-sectoral synergy, strengthened data governance, and the development of services that are responsive to the dynamics of migration, in order to guarantee the educational rights of migrant children in a fair and sustainable manner. These findings are expected to serve as a reference in formulating more effective educational repatriation policies in Indonesia.</p>

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2025-05-13 Direvisi: 2025-06-23 Dipublikasi: 2025-07-10  <b>Kata kunci:</b> <i>Program Repatriasi; Pendidikan Anak Migran; Pendidikan Non-Formal.</i>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas program repatriasi dalam menjamin keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak migran Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui kajian literatur terhadap 21 artikel ilmiah yang diterbitkan pada periode 2020–2025. Hasil penelitian mengungkap lima faktor utama yang memengaruhi keberhasilan repatriasi pendidikan, yaitu: (1) status dokumen dan legalitas anak, (2) ketersediaan layanan pendidikan non-formal, (3) efektivitas pelaksanaan program ADEM dan skema repatriasi pendidikan, (4) keterlibatan pemerintah daerah dan komunitas lokal, serta (5) koordinasi antar-lembaga pemerintah. Temuan menunjukkan bahwa ketidakadaan dokumen legal merupakan hambatan administratif sekaligus sosial dalam mengakses layanan pendidikan formal di Indonesia. Di sisi lain, keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan sanggar bimbingan di negara penempatan berfungsi sebagai mekanisme transisi menuju sistem pendidikan nasional. Peran aktif pemerintah serta dukungan komunitas lokal terbukti krusial dalam memastikan proses reintegrasi pendidikan yang inklusif dan adaptif. Penelitian ini menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, penguatan tata kelola data, serta pengembangan layanan yang responsif terhadap dinamika migrasi, guna menjamin pemenuhan hak pendidikan anak-anak migran secara adil dan berkelanjutan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan repatriasi pendidikan yang lebih efektif di Indonesia.</p>

## I. PENDAHULUAN

Mobilitas tenaga kerja lintas negara telah menjadi fenomena global yang melibatkan jutaan pekerja migran, termasuk dari Indonesia. Di balik kontribusi ekonomi yang signifikan dari para pekerja migran, terdapat persoalan sosial yang kompleks, salah satunya adalah persoalan pendidikan bagi anak-anak mereka yang turut

serta atau lahir di negara penempatan. Pendidikan anak pekerja migran, khususnya di luar negeri, menjadi salah satu isu penting karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dasar, keberlanjutan pembangunan manusia, serta perlindungan sosial (Lahaling, 2020). Hal ini menjadi semakin kompleks ketika pekerja migran dan anak-anaknya harus kembali ke

Indonesia melalui proses repatriasi—baik secara sukarela, karena habis masa kontrak, maupun karena faktor pemulangan secara paksa.

Program repatriasi bukan sekadar proses pemulangan secara jasmaniah, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan pendidikan yang memerlukan penanganan lintas sektor. Salah satu dimensi yang paling penting adalah keberlanjutan pendidikan anak-anak yang sebelumnya telah menjalani sistem pendidikan non-formal, terbatas, atau bahkan tanpa akses pendidikan di negara penempatan. Dalam banyak kasus, anak-anak ini mengalami keterputusan pendidikan, kesenjangan keterampilan, hingga ketidaksesuaian kurikulum yang berpengaruh terhadap adaptasi mereka di sistem pendidikan formal Indonesia (Indrawati & Kuncoro, 2021). Oleh karena itu, efektivitas program repatriasi menjadi sangat penting dalam menjamin bahwa proses pemulangan tidak hanya menyentuh aspek administratif, tetapi juga menjamin hak pendidikan yang setara dan berkelanjutan bagi anak-anak migran (Wijayanti et al., 2023).

Berbagai inisiatif telah dikembangkan pemerintah Indonesia untuk mengatasi persoalan ini. Program seperti ADEM (Afirmasi Pendidikan Menengah), penyediaan sanggar bimbingan, pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Community Learning Center (CLC), dan program beasiswa repatriasi merupakan beberapa bentuk intervensi yang diharapkan mampu mengisi kekosongan akses pendidikan bagi anak-anak migran yang terrepatriasi (Effendi & Rahmi, 2024; M. N. Hidayat & Hariyani, 2022; Mahardhani et al., 2023; Winatha et al., 2021). Meski demikian, tidak semua inisiatif ini berjalan secara optimal dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas program repatriasi dalam menjamin hak pendidikan anak-anak migran tidak bersifat tunggal atau linier. Sebaliknya, hal tersebut merupakan hasil interaksi dari berbagai elemen struktural dan kontekstual, seperti regulasi pemerintah, kesiapan institusi pendidikan, peran keluarga migran, serta dukungan komunitas lokal. Di sisi lain, faktor administratif seperti ketiadaan dokumen resmi, ketidaksesuaian kurikulum luar negeri, serta keterbatasan sumber daya sekolah lokal menjadi hambatan sistemik yang harus dihadapi (Pinson & Arnot, 2024; Tlepina et al., 2024). Keberhasilan suatu program repatriasi dalam ranah pendidikan sangat bergantung pada sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil.

Di tengah kompleksitas tersebut, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor penentu yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan program repatriasi dalam mengintegrasikan anak-anak migran ke sistem pendidikan nasional. Sayangnya, penelitian dengan pendekatan empirik langsung masih terbatas karena keterbatasan data dan akses pada populasi yang dimaksud. Oleh karena itu, pendekatan melalui tinjauan literatur kualitatif menjadi alternatif yang dapat menggali pemahaman konseptual dan naratif dari berbagai temuan yang telah dipublikasikan sebelumnya, baik oleh akademisi, lembaga pemerintah, maupun organisasi internasional.

Tinjauan literatur kualitatif dalam penelitian ini memungkinkan penelusuran berbagai faktor yang telah diidentifikasi oleh penelitian sebelumnya sebagai penentu efektivitas program repatriasi di bidang pendidikan. Beberapa studi menunjukkan bahwa keberadaan pusat pembelajaran non-formal di negara penempatan menjadi penentu awal dalam kesiapan anak untuk mengikuti sistem pendidikan nasional setelah pulang (Mahardhani et al., 2023; Nugraheni & Alfarizki, 2022; Udhwalalita & Hakim, 2023). Sementara itu, studi lainnya menyoroti pentingnya dokumen administrasi dan legalitas anak sebagai prasyarat untuk mengakses layanan pendidikan di Indonesia (T. Hidayat et al., 2023; Sulistya Handoyo & Triarda, 2020). Dalam perspektif yang lebih luas, penguatan identitas nasional dan motivasi belajar anak juga dipandang sebagai faktor non-struktural yang dapat memengaruhi keberlanjutan pendidikan mereka setelah repatriasi.

Selain itu, verifikasi dan pengakuan atas hasil belajar anak migran selama di luar negeri menjadi isu strategis yang memerlukan solusi kebijakan jangka panjang. Ketidakterpaduan sistem pendidikan Indonesia dengan sistem non-formal luar negeri membuat banyak anak migran terpaksa mengulang jenjang pendidikan, yang pada gilirannya memengaruhi semangat belajar dan integrasi sosial mereka (Kusumawati & Rindrayani, 2024). Di sinilah letak pentingnya program transisi pendidikan yang terstruktur, fleksibel, dan akomodatif terhadap kondisi khusus anak migran.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut, maka fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi dan mengkaji secara mendalam berbagai faktor penentu efektivitas program repatriasi terhadap pendidikan anak migran Indonesia. Penelitian ini berupaya merangkum

dan menganalisis data dari berbagai literatur ilmiah dan kebijakan, guna menyusun gambaran menyeluruh tentang tantangan, potensi, serta peluang perbaikan dalam sistem repatriasi pendidikan. Melalui pendekatan deskriptif-kualitatif berbasis tinjauan literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam upaya penguatan sistem pendidikan yang inklusif dan responsif terhadap kelompok rentan seperti anak-anak pekerja migran Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode kajian literatur untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas program repatriasi pendidikan bagi anak-anak migran Indonesia berdasarkan studi-studi terkini tahun 2020–2025. Data diperoleh dari sumber ilmiah seperti Google Scholar dan Semantic Scholar dengan kata kunci terkait repatriasi pendidikan anak migran, reintegrasi anak PMI, program ADEM, pendidikan non-formal, dan koordinasi antarlembaga. Dari 32 artikel yang ditemukan, 21 artikel memenuhi kriteria inklusi dan dianalisis secara tematik. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman komprehensif terhadap tantangan yang dihadapi anak migran pascarepatriasi serta menyusun rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil telaah dari 21 literatur yang dilakukan secara sistematis, diperoleh sejumlah temuan utama terkait faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas program repatriasi dalam menjamin akses dan keberlanjutan pendidikan anak-anak migran Indonesia. Temuan-temuan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek berikut:

#### 1. Status Dokumen dan Legalitas Anak

Salah satu hambatan paling krusial dalam efektivitas program repatriasi terhadap pendidikan anak-anak migran Indonesia adalah status dokumen dan legalitas mereka (T. Hidayat et al., 2023). Banyak anak migran yang lahir di luar negeri tidak memiliki akta kelahiran, kartu identitas, atau dokumen kependudukan lainnya yang diperlukan untuk mengakses layanan pendidikan formal di Indonesia

(Sugeng, 2023). Ketika mereka kembali ke tanah air, sistem pendidikan nasional mensyaratkan dokumen administratif yang sah untuk pendaftaran sekolah. Tanpa dokumen tersebut, anak-anak kerap ditolak oleh sekolah-sekolah negeri maupun swasta, sehingga kehilangan hak dasar atas pendidikan (Ashfiya Nur Atqiya et al., 2024; Asrobudi, 2019; Rianti et al., 2024). Situasi ini menunjukkan bahwa status legalitas bukan hanya masalah administratif, tetapi menjadi pintu masuk atau penghalang bagi inklusi pendidikan.

Lebih lanjut, ketiadaan dokumen resmi juga berdampak pada pengakuan terhadap pengalaman belajar anak selama berada di luar negeri. Meski beberapa anak mengikuti pembelajaran formal di CLC mereka tidak memiliki bukti legal yang dapat digunakan untuk menilai atau menempatkan mereka dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini menyulitkan proses reintegrasi akademik dan menyebabkan keterputusan jalur pendidikan. Maka, efektivitas program repatriasi sangat bergantung pada adanya sinergi antara lembaga pencatatan sipil, institusi pendidikan, dan dinas sosial dalam memfasilitasi percepatan legalisasi dokumen anak-anak migran secara terintegrasi dan responsif. Tanpa perbaikan di aspek ini, berbagai upaya pemulangan anak migran berisiko tidak berdampak optimal terhadap keberlanjutan pendidikan mereka.

#### 2. Ketersediaan Layanan Pendidikan Non-Formal

Layanan pendidikan non-formal, seperti sanggar bimbingan dan PKBM, memainkan peran penting sebagai fondasi awal pendidikan bagi anak-anak pekerja migran di Malaysia. Keberadaan lembaga-lembaga ini menjadi solusi alternatif terhadap keterbatasan akses anak migran terhadap pendidikan formal akibat status hukum yang tidak jelas (Fuadi et al., 2024; Maghfirah, 2024; Tuti Marjan Fuadi et al., 2024). Di dalam sanggar dan PKBM, anak-anak mendapatkan pengenalan terhadap bahasa Indonesia, keterampilan dasar literasi dan numerasi, serta pembentukan karakter dan wawasan kebangsaan (Amanda et al., 2024; Hidayah & Ratih, 2024). Dengan bekal ini, mereka memiliki kesiapan awal yang lebih baik untuk

melanjutkan pendidikan di Indonesia pasca-repatriasi. Materi yang disampaikan umumnya telah disesuaikan dengan konteks pendidikan nasional, sehingga membantu meminimalkan kesenjangan kurikulum dan hambatan adaptasi.

Selain sebagai wahana pembelajaran, layanan pendidikan non-formal juga berfungsi sebagai jembatan transisi sosial dan psikologis bagi anak-anak migran yang akan kembali ke Indonesia (Rosdiana, 2022; Setiyowati et al., 2024). Program-program ini juga sering melibatkan komunitas orang tua dan pendidik migran, sehingga memperkuat jejaring dukungan sosial dan emosional anak. Meski bersifat sementara dan terbatas, pendidikan non-formal ini memiliki kontribusi signifikan dalam memperkecil ketimpangan pendidikan dan meningkatkan kelangsungan proses belajar setelah repatriasi.

### 3. Efektivitas Program ADEM dan Repatriasi Pendidikan

Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) dan program repatriasi pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia menjadi inisiatif strategis untuk menjamin kelanjutan pendidikan anak-anak migran setelah kembali ke tanah air. Melalui skema ini, anak-anak repatriasi diberikan berbagai bentuk dukungan, seperti beasiswa pendidikan, fasilitas tempat tinggal di asrama, dan akses langsung ke satuan pendidikan formal. Kebijakan ini bertujuan tidak hanya untuk memberikan tempat bersekolah, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang inklusif, aman, dan kondusif. Keberadaan program ADEM memberikan afirmasi bahwa anak-anak migran memiliki hak pendidikan yang sama dengan anak-anak Indonesia lainnya (Widayanti, 2022), tanpa diskriminasi akibat latar belakang migrasi atau status sosial ekonomi.

Namun demikian, efektivitas program ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor teknis dan kelembagaan, terutama kesiapan daerah tujuan repatriasi. Di beberapa daerah, terbatasnya kapasitas sekolah, minimnya tenaga pendidik yang memahami latar belakang anak migran, serta kurangnya pendampingan psikososial menjadi kendala utama dalam proses

integrasi (Mock-Muñoz de Luna et al., 2020). Selain itu, kelemahan dalam sistem pendataan dan koordinasi antar-instansi—baik antara kementerian, pemerintah daerah, hingga lembaga pendidikan—kerap menimbulkan hambatan birokratis dan keterlambatan dalam pelayanan. Oleh karena itu, untuk menjadikan program ADEM dan repatriasi pendidikan benar-benar efektif, diperlukan sistem monitoring yang berkelanjutan, perencanaan berbasis data yang akurat, serta mekanisme evaluasi partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (Martono et al., 2020).

### 4. Keterlibatan Pemerintah Daerah dan Komunitas

Peran pemerintah daerah dan komunitas lokal menjadi komponen krusial dalam keberhasilan program repatriasi pendidikan anak-anak migran (Rohman et al., 2023). Ketika pemerintah daerah memiliki komitmen kuat terhadap isu reintegrasi anak migran, berbagai upaya strategis dapat dilakukan secara lebih cepat dan kontekstual. Ini meliputi pendataan yang akurat terhadap anak-anak yang baru pulang, penyusunan program transisi pembelajaran, hingga fasilitasi penerimaan anak di sekolah-sekolah lokal. Selain itu, dukungan seperti penyediaan transportasi, penyuluhan kepada orang tua, serta pelatihan guru dalam menangani anak repatriasi turut memperkuat proses adaptasi mereka dalam lingkungan belajar baru (Nugroho et al., 2024). Daerah-daerah dengan praktik tata kelola kolaboratif menunjukkan tingkat keberhasilan repatriasi pendidikan yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Di sisi lain, minimnya keterlibatan aktif pemerintah daerah dan lemahnya peran komunitas sering menyebabkan anak-anak migran mengalami ketertinggalan dalam proses pendidikan pasca-repatriasi (Kusumawati & Rindrayani, 2024). Ketiadaan mekanisme pendampingan, buruknya komunikasi antarunit layanan sosial dan pendidikan, serta kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan khas anak migran membuat mereka lebih rentan terhadap putus sekolah atau marginalisasi di lingkungan sekolah. Komunitas lokal, seperti organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh adat,

semestinya dapat menjadi jembatan sosial yang membantu keluarga migran memahami sistem pendidikan dan mendukung keberlangsungan belajar anak. Dengan demikian, keberhasilan program repatriasi tidak cukup hanya bergantung pada kebijakan pusat, tetapi sangat ditentukan oleh respons dan kolaborasi di tingkat akar rumput.

#### 5. Koordinasi Antar-Lembaga Pemerintah

Koordinasi antar-lembaga pemerintah merupakan fondasi penting dalam menjamin kelancaran dan keberhasilan program repatriasi pendidikan anak migran (Koesbardiati et al., 2022; Rohman et al., 2023). Keterlibatan berbagai instansi seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), serta instansi daerah seperti dinas pendidikan dan dinas kependudukan, harus terjalin dalam sistem kerja yang terintegrasi. Ketika koordinasi ini berjalan dengan baik, seluruh tahapan—mulai dari pemulangan anak, verifikasi identitas, pemetaan kebutuhan pendidikan, hingga penempatan ke satuan pendidikan—dapat dilakukan secara tepat waktu dan responsif. Kejelasan pembagian peran, sistem informasi yang terhubung, serta prosedur operasional yang seragam akan memperkuat efektivitas pelaksanaan program dan meminimalkan celah layanan.

Sebaliknya, lemahnya koordinasi antarlembaga seringkali menjadi titik lemah yang menyebabkan berbagai persoalan teknis dan kebijakan di lapangan (Maemunah & Sakban, 2025; Sudarmanto, 2022; Supranoto & HS, 2022). Tumpang tindih kewenangan, inkonsistensi data antar instansi, serta lambatnya pengambilan keputusan menyebabkan anak-anak migran berada dalam ketidakpastian akses pendidikan. Akibatnya, proses masuk sekolah tertunda, bantuan tidak tepat sasaran, bahkan dalam beberapa kasus, anak-anak tidak teridentifikasi sebagai bagian dari program repatriasi. Kurangnya forum koordinasi lintas sektor, tidak adanya sistem pelacakan anak migran pascarepatriasi, dan minimnya evaluasi kolaboratif memperburuk ketidakefisienan program. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan tata kelola antar-lembaga berbasis integrasi

data, komunikasi lintas fungsi yang rutin, serta mekanisme tanggap darurat untuk memastikan bahwa setiap anak migran yang dipulangkan dapat segera memperoleh hak pendidikannya secara layak dan berkelanjutan.

### B. Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program repatriasi pendidikan bagi anak-anak migran Indonesia ditentukan oleh interaksi kompleks antara faktor struktural, institusional, dan sosial. Kelima aspek utama yang diidentifikasi—status dokumen dan legalitas anak, ketersediaan layanan pendidikan non-formal, efektivitas program ADEM dan repatriasi, keterlibatan pemerintah daerah dan komunitas, serta koordinasi antar-lembaga pemerintah—berjalan saling terkait dan menentukan sejauh mana hak pendidikan anak migran dapat diwujudkan secara adil dan berkelanjutan.

Pertama, status dokumen dan legalitas anak terbukti menjadi hambatan paling mendasar dalam proses reintegrasi ke sistem pendidikan nasional. Banyak anak migran yang tidak memiliki dokumen sah seperti akta kelahiran atau kartu identitas, sehingga tidak dapat diterima di sekolah formal (T. Hidayat et al., 2023; Sugeng, 2023; Ashfiya Nur Atqiya et al., 2024). Selain itu, pengalaman belajar anak di luar negeri sering kali tidak diakui secara formal akibat ketiadaan bukti legal (Asrobudi, 2019; Rianti et al., 2024). Maka, efektivitas repatriasi sangat ditentukan oleh sinergi antara Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, dan institusi pendidikan dalam mempercepat legalisasi dokumen anak secara terintegrasi.

Kedua, keberadaan layanan pendidikan non-formal seperti PKBM dan sanggar bimbingan menjadi penyokong penting dalam mempersiapkan anak-anak migran untuk kembali ke sistem pendidikan Indonesia (Fuadi et al., 2024; Maghfirah, 2024; Tuti Marjan Fuadi et al., 2024). Layanan ini tidak hanya memperkenalkan bahasa Indonesia dan keterampilan dasar, tetapi juga menjadi ruang transisi psikososial yang membangun kesiapan mental dan karakter anak (Amanda et al., 2024; Hidayah & Ratih, 2024; Rossdiana, 2022; Setiyowati et al., 2024). Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas kurikulum, kapasitas fasilitator, dan dukungan kebijakan pemerintah.

Ketiga, program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) menunjukkan upaya

afirmatif negara dalam menjamin hak pendidikan anak migran dengan menyediakan beasiswa, asrama, dan akses langsung ke satuan pendidikan (Widayanti, 2022). Namun demikian, masih terdapat tantangan implementasi di lapangan, seperti keterbatasan daya tampung sekolah, minimnya pemahaman pendidik terhadap latar belakang anak migran, serta lemahnya koordinasi antarinstansi (Mock-Muñoz de Luna et al., 2020). Untuk itu, sistem pendataan yang akurat, monitoring berkelanjutan, dan evaluasi partisipatif menjadi keharusan (Martono et al., 2020).

Keempat, peran pemerintah daerah dan komunitas lokal menjadi penentu utama keberhasilan program repatriasi (Rohman et al., 2023). Ketika daerah memiliki komitmen dan tata kelola yang adaptif, integrasi pendidikan anak migran dapat berjalan lebih efektif (Nugroho et al., 2024). Sebaliknya, lemahnya keterlibatan daerah dan komunitas sering menyebabkan anak tertinggal dalam pendidikan dan mengalami marginalisasi (Kusumawati & Rindrayani, 2024). Komunitas lokal seperti LSM dan tokoh adat seharusnya dapat menjadi penghubung penting untuk menjembatani kebutuhan anak migran dengan sistem pendidikan nasional.

Kelima, koordinasi antar-lembaga menjadi fondasi kunci yang menentukan kelancaran program. Keterlibatan kementerian teknis seperti Kemendikbud, Kemenlu, Kemensos, BP2MI, dan instansi daerah seperti Dinas Pendidikan serta Dinas Dukcapil harus berjalan dalam sistem kerja yang terintegrasi (Koesbardiati et al., 2022; Rohman et al., 2023). Jika koordinasi ini lemah, seperti tumpang tindih kewenangan dan inkonsistensi data, maka anak-anak migran rawan terhambat dalam memperoleh akses pendidikan (Maemunah & Sakban, 2025; Sudarmanto, 2022; Supranoto & HS, 2022). Penguatan sistem informasi, SOP lintas sektor, dan pelacakan anak pascarepatriasi menjadi kebutuhan mendesak agar program ini tidak hanya berjalan administratif, tetapi benar-benar menjamin hak anak atas pendidikan.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Efektivitas program repatriasi pendidikan bagi anak-anak migran Indonesia sangat dipengaruhi oleh lima faktor utama: legalitas dokumen anak, ketersediaan layanan pendidikan non-formal, efektivitas program

ADEM, keterlibatan pemerintah daerah dan komunitas, serta koordinasi antarlembaga pemerintah. Kelima aspek ini saling berkaitan dan membentuk ekosistem yang menentukan keberhasilan integrasi anak-anak migran ke dalam sistem pendidikan nasional. Ketidakhadiran dokumen sah, lemahnya dukungan komunitas lokal, dan buruknya koordinasi antarinstansi masih menjadi tantangan yang signifikan. Oleh karena itu, efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pusat, tetapi juga oleh kesiapan daerah dan kekuatan tata kelola kolaboratif lintas sektor.

##### B. Saran

Agar program repatriasi pendidikan anak migran berjalan lebih optimal, diperlukan penguatan sinergi antar-lembaga melalui sistem informasi yang terintegrasi, SOP lintas sektor yang jelas, dan forum koordinasi rutin antara pusat dan daerah. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas responsif terhadap kedatangan anak repatriasi dengan menyiapkan fasilitas, pendampingan psikososial, serta pelatihan bagi pendidik. Di sisi lain, komunitas lokal dan organisasi masyarakat harus dilibatkan aktif sebagai agen transisi sosial dan kultural. Upaya percepatan legalisasi dokumen anak juga harus diprioritaskan untuk menghindari keterlambatan akses pendidikan. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis hak anak, program repatriasi dapat menjadi jembatan nyata menuju pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Amanda, S. S., Putri, A. K., Nisa, R. S., & Fauzi, R. (2024). Integrasi Pendidikan Budaya dan Lagu Nasional untuk Memperkenalkan Identitas Bangsa Indonesia di Sanggar Bimbingan Malaysia. *Bangun Desa: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 136. [https://doi.org/10.21927/jbd.2024.3\(2\).136-147](https://doi.org/10.21927/jbd.2024.3(2).136-147)
- Ashfiya Nur Atqiya, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Auria Trisi Novi Ana, Ari Maulana Ramadhan, & Luthfiah Luthfiah. (2024). Kewarganegaraan dan Kebijakan Pendidikan di Indonesia Tantangan bagi Anak-anak dengan Status Kewarganegaraan Tidak Jelas. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 150-161.

<https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i4.300>

- Asrobudi, A. (2019). Adaptive Structuration Process In The Education Of Indonesian Migrant Workers' Children (Case study in 9th Grade of Junior High School in CLC Kundasang, CLC Ribu Bonus, and Sekolah Indonesia Kota Kinabalu Sabah Malaysia). *Proceedings of the 1st Aceh Global Conference (AGC 2018)*. <https://doi.org/10.2991/agc-18.2019.4>
- Effendi, T., & Rahmi, A. (2024). Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Pekerja Migran Indonesia di Klang Lama, Malaysia. *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.56114/maslahah.v5i1.11448>
- Fuadi, T. M., Raisah, P., & Rahmi, M. (2024). Peningkatan Kemampuan Membaca, Menulis dan Berhitung (Calistung) Pada Anak Pekerja Migran Malaysia. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 7(2), 541-550. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v7i2.12465>
- Hidayah, K., & Ratih, R. (2024). Penguatan Nasionalisme melalui Kebhinekaan Global, Literasi Numerasi dan Motivasi Berwirausaha Pada Anak-Anak Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Inovasi Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 56-67. <https://doi.org/10.53621/jippmas.v4i1.290>
- Hidayat, M. N., & Hariyani, N. (2022). Mewujudkan Pemerataan Pendidikan: Studi Kasus Community Learning Center (CLC) di Perbatasan Indonesia-Malaysia. *Global Focus*, 2(2), 138-148. <https://doi.org/10.21776/ub.jgf.2022.002.02.4>
- Hidayat, T., Asmaroini, A. P., Sunarto, S., Sulton, S., & Chaniago, Z. (2023). Overview of Human Rights for Indonesian Migrant Worker Children to Receive An Education at The Hulu Langat Malaysia Guidance Studio. *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 15(2), 935-944. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v15i2.3305>
- Indrawati, S. M., & Kuncoro, A. (2021). Improving Competitiveness Through Vocational and Higher Education: Indonesia's Vision For Human Capital Development In 2019-2024. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 57(1), 29-59. <https://doi.org/10.1080/00074918.2021.1909692>
- Koesbardiati, T., Kinasih, S. E., Murti, D. B., Ida, R., & Wahyudi, I. (2022). Tata Kelola Kolaboratif dalam Penanganan Permasalahan Anak Pekerja Migran. *Journal of Governance and Administrative Reform*, 3(1), 72-83. <https://doi.org/10.20473/jgar.v3i1.37933>
- Kusumawati, S. A., & Rindrayani, S. R. (2024). Perkembangan Pendidikan Anak Buruh Migran di Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung. *Publiciana*, 17(01), 54-61. <https://doi.org/10.36563/publiciana.v17i01.988>
- Lahaling, H. (2020). Fulfill the Basic Rights of Indonesian Migrant Workers' Children in the Human Rights Perspective. *Musamus Law Review*, 2(2), 76-105. <https://doi.org/10.35724/mularev.v2i2.3014>
- Maemunah, M., & Sakban, A. (2025). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Penelantaran Anak Pekerja Migran Indonesia: Studi Yuridis-Empiris. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 13(1), 72. <https://doi.org/10.31764/civicus.v13i1.30221>
- Maghfirah, N. M. R. (2024). PKBM as an Alternative to Inclusive Education for the Community. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 12(1), 86. <https://doi.org/10.24036/spektrumpls.v12i1.126673>
- Mahardhani, A. J., Sutrisno, S., Rusdiani, N. I., Cahyono, H., Asmaroini, A. P., Kristiana, D., & Ayuningtyas, E. D. P. (2023). Pembelajaran Lintas Budaya Melalui Aktivitas Mengajar pada Sanggar Bimbingan Non Formal di Malaysia. *Dharma Sevanam: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 58-67. <https://doi.org/10.53977/sjpkm.v2i1.956>
- Martono, T., Baedhowi, B., Sawiji, H., Totalia, S. A., Wahyono, B., & Octoria, D. (2020). The

- Effectiveness of High School Affirmations (ADEM) Repatriation: Empirical Evidence from Central Java and Special Region of Yogyakarta, Indonesia. *Budapest International Research and Critics in Linguistics and Education (BirLE) Journal*, 3(4), 1841–1847. <https://doi.org/10.33258/birle.v3i4.1380>
- Mock-Muñoz de Luna, C., Granberg, A., Krasnik, A., & Vitus, K. (2020). Towards more equitable education: meeting health and wellbeing needs of newly arrived migrant and refugee children—perspectives from educators in Denmark and Sweden. *International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being*, 15(sup2), 1773207. <https://doi.org/10.1080/17482631.2020.1773207>
- Nugraheni, A. S. C., & Alfarizki, F. R. (2022). Optimizing The Existence of Non-Formal Education to Support Childrens’s Developmental Rights. *DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogik*, 6(3), 501. <https://doi.org/10.20961/jdc.v6i3.68121>
- Nugroho, M., Hariyati, N., Dwi Lestari, G., Wulandari, A., & Khamidi, A. (2024). Implementasi Program Afiriasi Pendidikan Tinggi Bagi Anak Pekerja Migran Indonesia di Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(12), 1973–1989. <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i12.6588>
- Pinson, H., & Arnot, M. (2024). When the universal right to education meets the liminal legality of migrant children. *Citizenship Studies*, 28(8), 818–837. <https://doi.org/10.1080/13621025.2025.2480027>
- Rianti, R., Mahardani, A. Z., Cahyono, H., & Putri, W. Z. (2024). Enthusiastic Study of Children of Indonesia Migrant Workers in Selangor, Malaysia Who Do Not Have Access to Formal Education. *Journal of Social Research*, 3(10). <https://doi.org/10.55324/josr.v3i10.2275>
- Rohman, R. H., Prastyo, D., Hidayat, A. I., Mahmud, R. S., Syahririni, S., Rahmaniati, R., & Zannah, F. (2023). Implementasi Program Pendidikan bagi Anak-Anak WNI di ICC Ladang Kosma Malaysia. *Jurnal Keilmuan Dan Keislaman*, 237–252. <https://doi.org/10.23917/jkk.v2i4.163>
- Rosdiana, R. A. (2022). Masa Depan di Perbatasan: Pendekatan Humanitarian Pendidikan Pengungsi Anak di Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 15(1), 53–73. <https://doi.org/10.20473/jhi.v15i1.33711>
- Setiyowati, N., Fatmawiyati, J., Muntomimah, S., Sanjaya, F. A. P., Indahyati, L. N., & Shohenuddin, S. (2024). Mencintai Indonesia: Psikoedukasi Pengembangan Karakter dan Moral Pancasila di Kalangan Anak-Anak Pekerja Migran di Sentul Malaysia. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 4(4), 3032–3043. <https://doi.org/10.70609/icom.v4i4.5780>
- Sudarmanto, H. (2022). STRATEGY FOR ENSURING OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS (PMI) CHILDREN HAVE THE RIGHT TO A GOOD EDUCATION. *International Journal of Social Science*, 2(3), 1703–1710. <https://doi.org/10.53625/ijss.v2i3.3632>
- Sugeng, T. A. (2023). PENTINGNYA AKTA KELAHIRAN SEBAGAI IDENTITAS ANAK YANG DILAHIRKAN. *FENOMENA*, 21(2), 186. <https://doi.org/10.36841/fenomena.v21i2.3778>
- Sulistya Handoyo, B., & Triarda, R. (2020). Problematika Pendidikan di Perbatasan: Studi Kasus Pendidikan Dasar bagi Anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Negara Bahagian Sarawak, Malaysia. *Transformasi Global*, 7(2), 201–213. <https://doi.org/10.21776/ub.jtg.2020.007.02.2>
- Supranoto, S., & HS, M. H. (2022). Dinamika Kelembagaan dalam Tata Kelola Pekerja Migran Indonesia. *E-Sospol*, 9(4), 369. <https://doi.org/10.19184/e-sos.v9i4.36374>
- Tlepina, Sh. V., Akshalova, R. D., & Ramazan, A. E. (2024). International legal protection of the right to the education of migrant children. *BULLETIN of L.N. Gumilyov Eurasian National University. LAW Series*, 147(2), 78–88. <https://doi.org/10.32523/2616-6844-2024-147-2-78-88>



- Tuti Marjan Fuadi, Yuni Rahmayanti, Riska Nasuha, Nabilla Aprilya, & Saskia Putri. (2024). PENDAMPINGAN STIMULASI LITERASI MELALUI STRATEGI MEMBACA BEBAS TERBIMBING (MBT) PADA ANAK-ANAK MIGRAN. *BESIRU : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(10), 815-821. <https://doi.org/10.62335/qzm3ns24>
- Udhwalalita, A. A., & Hakim, M. F. (2023). PEMENUHAN PENDIDIKAN ANAK-ANAK PMI DI MALAYSIA OLEH PUSAT PENDIDIKAN WARGA NEGERA INDONESIA. *SIYAR Journal*, 3(1), 31-42. <https://doi.org/10.15642/siyar.2023.3.1.31-42>
- Widayanti, R. S. (2022). Manajemen Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) Papua-Papua Barat dan Repatriasi Pada Sekolah Mitra di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Media Manajemen Pendidikan*, 4(2), 290-310. <https://doi.org/10.30738/mmp.v4i2.10039>
- Wijayanti, S., Retno Wulan, T., Santoso, J., & Muslihudin, M. (2023). Scholarship as a Method to Enhance the Identity of Undocumented Children of Indonesian Migrant Workers in Sabah, Malaysia. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i3.12856>
- Winatha, I. K., Maydiantoro, A., Suroto, S., Rahmawati, F., & Rizal, Y. (2021). The effectiveness of secondary education affirmation program (ADEM) for repatriated students in Indonesia: A case study in Lampung province on Sumatra island. *International Journal of Educational Studies in Social Sciences (IJESSS)*, 1(1), 1-6. <https://doi.org/10.53402/ijesss.v1i1.1>